

EVALUASI PERAN PEMERINTAH NAGARI AIA GADANG DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA BANJIR

Lidia Eka Putri^{1b}, Zikri Alhadi¹

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^blidiaekaputri46@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the role of the Nagari Aia Gadang government in dealing with the threat of flooding. This study uses qualitative analysis techniques with descriptive methods and data collection methods with interviews, observations, and documentation studies. This study's results illustrate the role of the Nagari Aia Gadang Government in dealing with the threat of flooding. Evaluation is an assessment process. And the assessment can be neutral, positive, negative, or a combination of the two.

Furthermore, regarding the role of the Nagari government in dealing with the threat of flood disasters, there are three indicators, namely providing socialization and appeals to the community if signs of flooding already exist, preventing flood disasters, and mitigating and evacuating. From the three role indicators carried out by the Nagari government, it can be assessed that it has carried out its role. Still, it has not been effective because Nagari implements no particular program. The obstacles the Nagari Nagari Aia Gadang government face are public knowledge, awareness, and a considerable budget.

Keywords: *Evaluation, Role of Nagari Government, Flood*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah Nagari Aia Gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode deskriptif, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peran Pemerintah Nagari Aia Gadang dalam menghadapi ancaman banjir. Evaluasi ialah suatu proses penilaian. Dan penilaian tersebut bisa menjadi suatu yang netral, positif, negatif maupun gabungan dari keduanya. Selanjutnya Peran pemerintah nagari dalam menghadapi ancaman bencana banjir ada 3 indikator yaitu memberikan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat jika tanda-tanda banjir sudah ada, Melakukan pencegahan bencana banjir, melakukan mitigasi dan evakuasi. Dari ketiga indikator peran yang dilakukan oleh pemerintah nagari maka dapat diberi penilaian bahwa sudah menjalankan perannya namun hal itu belumlah efektif. Karena belum adanya program khusus yang dilaksanakan oleh nagari. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari nagari aia gadang adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta anggaran yang begitu besar.

Kata Kunci: *Evaluasi, Peran Pemerintah Nagari, Banjir*

Pendahuluan

Indonesia terletak pada perpotongan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Indo Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan terakhir lempeng Pasifik di timur, yang bertabrakan dan menimbulkan gempa bumi dan gunung berapi aktif di seluruh Indonesia. Indonesia juga rentan terhadap banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, dan abrasi karena hidrogeografinya. Ada bencana alam yang disebabkan oleh kekuatan geologi, variabel hidrometeorologi dan masalah biologis serta kegagalan teknologi.

UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam ataupun nonalam serta faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa.

Selanjutnya bencana yang terjadi tidaklah bisa dipastikan kapan datangnya namun hanya bisa diprediksi dengan adanya tanda-tanda yang ada. Bencana dapat mengancam segala wilayah Indonesia baik daratan, pegunungan maupun wilayah pesisir. Terjadinya bencana pasti akan memberikan dampak bagi masyarakat yaitu kerusakan, kehilangan harta benda hingga korban jiwa serta trauma yang nantinya dialami masyarakat saat terjadi bencana.

Terjadinya bencana pasti akan memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan strategi dalam hal pengurangan resiko bencana. Hal yang dapat dilakukan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Prabencana. Yaitu meliputi situasi pada saat belum terjadinya bencana serta adanya potensi untuk terjadi bencana.
2. Pada saat tanggap darurat yang dilakukan pada saat terjadi bencana.
3. Tindakan pascabencana dilaksanakan setelah bencana terjadi di lokasi tertentu.

Dengan demikian, Sumatera Barat harus melakukan pengkajian serta pengelolaan pengurangan risiko bencana agar menjadi wilayah yang tangguh akan bencana. Dan diantaranya kabupaten Pasaman Barat yang juga memiliki banyak potensi bencana seperti banjir, longsor, abrasi serta gempa bumi. Untuk Kabupaten Pasaman Barat terdapat pusat pemerintahan yaitu kota Simpang Empat. Di sebelah barat dibatasi dengan pantai Samudera Indonesia, di sebelah utara adalah Provinsi Sumatera Utara, di sebelah timur adalah Kabupaten Pasaman, dan di sebelah selatan adalah Kabupaten Agam. Keempat wilayah ini menjadi batas wilayah Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat termasuk dengan kondisi wilayah yang rentan dan berpotensi terjadi berbagai macam bencana. Dengan hal itu upaya dari penanggulangan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus merencanakan serta melaksanakan upaya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana secara efektif dan menyeluruh sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan timbul. Salah satunya ialah dengan melakukan pengkajian risiko bencana khusus untuk Kabupaten Pasaman Barat.

Tipologi wilayah pasaman barat terdiri dari wilayah darat, perbukitan, pegunungan dan pantai serta pulau-pulau kecil dan hal ini menyebabkan pasbar rawan terhadap bencana. Hal ini menyebabkan terdapat 11 jenis bencana yang akan mungkin terjadi di pasbar ialah gelombang ekstrim, banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami, kebakaran lahan, gempa bumi, cuaca ekstrim, gagal teknologi, epidemiologi serta konflik sosial. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan. Nagari aia gadang merupakan sebuah nagari yang mana terletak di kecamatan pasaman, pasaman barat, sumatera barat. Nagari ini berpenduduk

mayoritas bermata pancarian sebagai petani.

Disini peran pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ialah harus memberikan pembekalan/pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ancaman bencana yang dapat terjadi, karena masyarakat yang mengetahui mengenai bencana akan bisa meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana yang mana sewaktu-waktu bisa terjadi. Hadirnya Undang-undang tentang penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta dilaksanakan dengan terstruktur dan terencana, terkoordinasi dan terpadu agar dapat meminimalisir ancaman bencana. Tidak hanya peran pemerintah daerah saja namun peran nagari juga diperlukan dalam pencegahan bencana karena nagari akan lebih dekat dengan sosial masyarakatnya. Ketika dihadapkan dengan kemungkinan bencana banjir, penting untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nagari mengatur peran dan tanggung jawab kepala nagari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan
2. Melaksanakan pembangunan
3. Sebagai Pembina masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat nagari

Sungai Batang Pasaman merupakan salah satu sungai yang mengalir di Kabupaten Pasaman Barat. Anak sungai Batang Pasaman adalah Batang Kanaikan serta Batang Tongar. Kawasan ini menjadi salah satu langganan banjir jika hujan terjadi berjam-jam dan cukup deras dan hujan nya bersifat merata. Sebelumnya jajaran pemerintahan Pasaman Barat bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah sudah meninjau lokasi yang biasanya rawan akan terjadinya bencana banjir, dan salah satunya membahas mengenai sungai batang pasaman. Alasan peninjauan ini dilakukan karena melihat kondisi batang pasaman ini perlu segera mendapatkan penanganan karena setiap tahunnya terjadi banjir. Saat ini sudah dilakukan sedikit bentuk penanggulangan yaitu berupa penanaman bambu untuk pengurangan resiko banjir. Dalam hal ini akan menargetkan menanam 1.500 bibit bambu di sepanjang aliran sungai batang pasaman yang mana sungai ini merupakan salah satu sungai besar.

Sungai batang pasaman jika hujan dengan intensitas tinggi maka akan meluap membuat ruas jalan Simpang Empat Pasbar menjadi terputus sehingga hal tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan serta menyebabkan rumah warga menjadi terendam banjir jika itu terjadi. Untuk tahun 2021 akan dilakukan perencanaan, namun normlisasinya sendiri akan dilakukan tahun 2022 “ kata Mahyeldi Ansharullah’. PJ. Walinagari Aia Gadang Jamaris Pada media Top Satu, Kamis (23/9) mengatakan, insyaallah dalam waktu dekat impian masyarakat lepas dari ancaman banjir yang mana telah menjadi langganan setiap tahunnya akan terlepas, sebab akan di bangun untuk penahan tebing dan menormalisasi sungai tersebut.

Runtuhnya tebing di sungai tersebut akibat tidak adanya bronjong/penahan tebing, ditambah pula derasnya aliran Sungai Batang Saman yang berada persis di dekat pemukiman warga tersebut. Menurut penuturan salah seorang anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Aia Gadang Riisnalino, kejadian runtuhnya tebing ini sudah berulang kali terjadi terutama pada musim penghujan dan aliran sungai meluap. Selain itu masyarakat juga masih banyak yang bertani dan dataran itu memang rendah dan pemerintah nagari juga sudah

memberitahu agar tidak melakukan kegiatan bertani di sekitaran sungai namun itu mata pencaharian mereka.

Bencana banjir yang terjadi pada tanggal 11-12 Oktober 2018 akibat bencana ini meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat di daerah aliran sungai di batang saman nagari Aia Gadang. Dan banjir di tahun 2018 ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh alih fungsi lahan di kawasan DAS yang sebelumnya merupakan daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, perkebunan dan komersial serta pertanian. Banjir Batang Pasaman Nagari Aia Gadang telah mendorong pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk menerapkan desain rencana pengelolaan banjir di Batang Pasaman pada tahun 2018. Di sini, pemerintah telah berusaha untuk melakukan penanggulangan banjir Batang Pasaman, tetapi karena keterbatasan APBD, itu tidak bisa berbuat banyak.

Desember tahun 2021 juga terjadi banjir di Pasir Bintungan Air Gadang dan Jorong Labuah Lurus Aia Gadang yang menyebabkan rumah terendam air tidak hanya itu lahan pertanian dan kelapa sawit juga terendam akibat banjir. Pasaman Barat mengharapkan pemerintah pusat mencari solusi atas banjir yang terus terjadi di sejumlah sungai, karena membutuhkan dana yang besar dan tidak cukup hanya mengandalkan subsidi APBD. Dengan ini diharapkan Pemprov Sumbar dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait Pasaman Barat dengan ancaman bencana alam. Dan dengan demikian diperlukan mitigasi

bencana untuk mengatasi bencana banjir. Pasaman Barat harus menjadi prioritas untuk kesiapsiagaan bencana, tetapi akan menelan biaya ratusan miliar dolar untuk mengelolanya.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan. Ketika mengevaluasi sesuatu, biasanya orang yang mengevaluasinya untuk menentukan nilai atau manfaatnya. Dalam arti khusus, evaluasi berkaitan dengan generasi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Khairu Zaman, 2012), evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu bekerja, yang kemudian digunakan untuk membuat alternatif yang tepat untuk pengambilan keputusan (Vaguita, 2018:25).

2. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Lantaeda et al, 2017:2) peran, aspek dinamis dari status, seseorang memenuhi peran jika ia melakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memenuhi tugas dan kewajiban ataupun tanggung jawab yang diberikan masing-masing dari organisasi ataupun lembaga. Dengan peran tersebut, pelaku baik individu ataupun organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan orang ataupun sesuai lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai persyaratan yang diberikan secara struktural (harapan, norma, tanggung jawab, tabu).

3. Konsep Nagari

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Undang-UU No. 9 Tahun 2015

tentang Pemerintah Daerah, Nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah di Indonesia, dan rujukannya dapat disesuaikan dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, pemerintah nagari memimpin dalam melaksanakan agenda pemerintah di bidang pembangunan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terkecil di antara pemerintah daerah. Dan pemerintah nagari berkewajiban untuk dapat mempunyai suatu kewajiban serta mampu untuk membangun nagari mereka sendiri.

4. Konsep Bencana

Keputusan UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam serta faktor ulah manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan serta pengaruh psikologis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bencana adalah peristiwa yang menimbulkan kerusakan dan kerugian pada manusia yang dapat disebabkan oleh sebab alam maupun non alam.

5. Konsep Bencana Banjir

Banjir adalah ketika sungai mengeluarkan lebih banyak air dari biasanya karena curah hujan yang terus menerus ke hulu atau di suatu tempat yang tidak dapat menampung aliran sungai yang ada sehingga menyebabkan air meluap dan akhirnya membanjiri daerah sekitarnya. Dalam (Ningrum dan Ginting, 2020). Banjir yang terjadi dapat berupa penggenangan pemukiman dan lahan pertanian serta pusat kota. Banjir terjadi ketika debit air dari sungai atau saluran air melebihi debit biasanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa banjir adalah genangan air yang terjadi ketika jumlah air melebihi batas dan tidak dapat lagi menampung debit yang begitu besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan model metode deskriptif. Selanjutnya fokus penelitian ini ialah evaluasi peran pemerintah nagari aia gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir, karena daerah ini selalu banjir jika intensitas hujan yang tinggi yaitu Jorong Pasir Bintungan dan Jorong Labuh Lurus. Lokasi penelitian ini tentu saja memfokuskan kepada daerah yang sering terkena dampak dari banjir di nagari aia gadang dan lokasi penelitian ini juga dilakukan di kantor wali nagari aia gadang. Selanjutnya informan penelitian yaitu pihak Pemerintahan Nagari, Jorong, Badan Musyawarah, BPBD, Dinas PUPR serta masyarakat dan memakai teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yang mana memiliki arti sebagai pengecekan sebuah data dari beberapa sumber, teknik dan waktu. Selain itu, prosedur analisis data yang digunakan peneliti meliputi reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, melihat peran pemerintah nagari aia gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir sudah terlihat namun belum maksimal. Maka dari itu penulis memberikan gambaran tentang evaluasi peran pemerintah nagari aia gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Evaluasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan. Adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk memperoleh informasi yang mana informasi tersebut dapat memberikan nilai dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Disini akan dijelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh pemerintah nagari aia gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan kendala yang dihadapi. Melaksanakan mitigasi yang dimaksud dalam Pasal 44 huruf c (UU No 24 Tahun 2007) yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Adapun untuk kegiatan mitigasi dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

1. Peran Pemerintah Nagari Aia Gadang Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Banjir.

Dalam menjalankan peran terkait penanggulangan banjir di nagari aia gadang(batang pasaman) pemerintah nagari memiliki peran yaitu:

1.1. Sosialisasi dan himbauan jika sudah ada tanda-tanda banjir

Peran ini harus dijalankan oleh pemerintah nagari agar masyarakat setempat memiliki pengetahuan agar saat banjir datang masyarakat tidak panik dan bisa untuk langsung menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dari hasil penelitian di lapangan dengan wawancara disini pihak nagari sudah menjalankan peran ini. Dikarenakan masyarakat sudah biasa dengan kondisi yang seperti ini. Maka masyarakat sudah mengetahui apa yang dilakukannya. Terkadang jika air sudah menggenangi rumah mereka namun tidak begitu besar masyarakat setempat hanya dapat memindahkan barang-barang ke lokasi ataupun tempat yang lebih tinggi. selain itu, pemerintah nagari juga ada namanya memberikan himbauan kepada masyarakat jika hujan sudah terlalu lama dan sudah ada tanda-tanda banjir maka pihak pemerintah nagari akan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan ini akan diinformasikan lewat sosial media nagari diberitahu kepada jorong dan jorong memberi tahu kepada masyarakat.

1.2. Melakukan pencegahan bencana banjir

Disini pemerintah nagari juga sudah menjalankan perannya dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Seperti penanaman pohon bambu di sekitaran tepian sungai ini dimaksud agar bisa menahan debit air, meskipun manfaat nya tidak dirasakan saat ini namun ini akan memberikan manfaat jika pohon bambu ini sudah besar dan juga akan memberikan nilai ekonomis nantinya bagi kehidupan masyarakat. Penanaman pohon bambu ini bentuk salah satu pengabdian kepada masyarakat. Meskipun ini bukan sepenuhnya dilakukan oleh nagari tetapi ini salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan bersama nagari. Yang kedua

yaitu adanya upaya untuk melarang aktivitas penambangan ilegal namun itu akan sulit dilakukan oleh nagari karena kewenangan tidak ada pada nagari.

1.3. Melakukan mitigasi dan evakuasi

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko pada saat terjadi bencana banjir. dalam hal ini peran nagari terlihat pada pengusulan pembangunan bronjong di dekat sungai. Namun pelaksanaan ini sangat memerlukan biaya yang sangat besar dan ini juga akan termasuk proyek nasional. Jadi nagari tentu saja tidak bisa membiayai ini dan nagari hanya mengusulkan pembangunan, ini selalu disampaikan pada setiap acara musrembang. Di samping itu juga sudah ada pemasangan alat pengukur suhu hujan di dekat jembatan jika debit air sudah melampaui batas maka alat tersebut akan berbunyi. Selanjutnya evakuasi juga dilakukan oleh nagari jika bencana banjir terjadi. Nagari akan melaksanakan perannya untuk membantu para masyarakat yang rumahnya terkena banjir. Dan ini tentu saja ada kerjasama yang dilakukan dengan BPBD sebagai badan penanggulangan bencana.

2. Kendala pemerintah nagari dalam menghadapi ancaman bencana banjir

2.1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat

Pengetahuan masyarakat akan bencana banjir sangat diperlukan agar saat banjir terjadi masyarakat tidak perlu panik untuk menyelamatkan diri mereka. Dan itulah gunanya sosialisasi yang dilakukan sebelumnya. Selain pengetahuan dari masyarakat kesadaran juga diperlukan untuk lebih bisa menerima apa yang disampaikan pemerintah nagari untuk keselamatan semuanya. Namun disini masih ada masyarakat yang beraktivitas di dekat sungai meskipun itu sudah disampaikan oleh pihak nagari itu akan membahayakan mereka serta akan membuat tanah sekitar sungai akan terkikis.

2.2. Anggaran

Kendala selanjutnya yaitu anggaran, anggaran ini selalu menjadi penundaan dalam setiap akan melakukan kegiatan/pelaksanaan. Jika semua perancangan sudah selesai namun anggaran belum ada maka pelaksanaan itu akan tertunda untuk dilaksanakan. Anggaran ini menjadi suatu hal yang utama di setiap kegiatan. Selain itu juga ada suatu pelaksanaan yang tidak menjadi kewenangan dari nagari sehingga nagari tidak bisa berbuat banyak dalam tindakan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Peran Pemerintah Nagari Aia Gadang Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Banjir pemerintah nagari sudah menjalankan perannya namun belum efektif, dan kendala yang ada ialah kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta anggaran yang begitu besar dan tidak bisa dibiayai nagari. Pembangunan bronjong yang belum dapat dilaksanakan karena tekendala pada anggaran yang begitu besar dan ini termasuk proyek yang besar.

Daftar Pustaka

Lantaeda, syaron brigette. Dkk. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan

- Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi publik*. Vol. 4, No. 48.
- Montessori, Maria, dkk. 2020. Membangun Kesadaran Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Nagari. *Jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*. Vol. 2, No. 2.
- Ningrum, ayu sekar dan Kronika Br. Ginting. 2020. Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geography science education journal*. Vol. 1, No. 1.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Vaguita, mercya. 2018. Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Program Sistem Administrasi Perkantoran Maya (simaya) di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jess*. Vol. 2, No. 1.